



## STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

### INDONESIA STRATEGY AGAINST SOUTH CHINA SEA CONFLICT

Hendra Maujana Saragih  
Universitas Nasional  
hendramaujana@gmail.com

#### ABSTRAK

Hingga saat ini, sengketa wilayah Laut China Selatan masih menjadi perhatian negara-negara di dunia, khususnya ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, sudah barang tentu, Indonesia turut angkat suara dan mengambil sikap terkait dengan konflik tersebut. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia harus bersikap netral. Walau begitu, Indonesia sangat berkepentingan agar perselisihan tersebut tidak pecah menjadi konflik terbuka. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan teori kepentingan nasional, serta konsep strategi militer, terlihat dengan jelas betapa dalam hal ini pemerintah Indonesia juga bertindak sebagai motor dan pengagas terbukanya kerjasama multilateral, mengintervensi, sekaligus menjadi jembatan untuk menghindari perang terbuka di antara negara-negara terlibat di dalamnya lewat pembentukan pelbagai forum yang diadakan baik di ASEAN dengan harapan agar konflik tersebut segera mereda.

**Kata kunci :** Strategi, Konflik, laut China Selatan

#### ABSTRACT

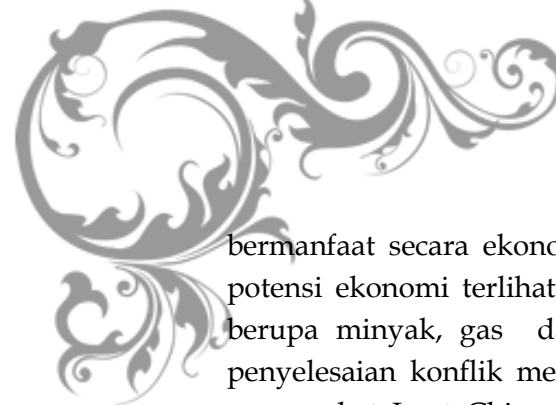
*Untill now South China Sea disputes still a concern of countries in the world, especially ASEAN. Indonesia as the member of ASEAN also very concern, speak out and must be neutral because his position is not the claims country, however Indonesia still have an interest and important role. Conflict among nations in this region is not allowed and maintaining the regional stability is big obligation deffenitly. Indonesia will continue with its pro-active role in South China Sea in order to maintain regional stability. If an open conflict occurs, it will be very meaningful and has negative impact for Indonesia as a very close maritime country to that conflict. So it is expected that Indonesia can manage the conflict and so needed.*

**Keywords:** Strategy, Conflict, South China Sea

#### PENDAHULUAN


Keterlibatan Indonesia dalam manajemen konflik di Laut China Selatan adalah sesuatu yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Bila dilihat dari asas manfaat, pencapaian sebuah resolusi konflik bagi persoalan Laut China Selatan tidak saja





bermanfaat secara ekonomi, akan tetapi juga politik dan keamanan. Besarnya potensi ekonomi terlihat dengan jelas pada jalur pelayaran, kandungan alam berupa minyak, gas dan mineral serta kekayaan ikannya. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik memiliki manfaat yang sangat signifikan tidak saja bagi masyarakat Laut China Selatan, juga bagi Indonesia dan dunia internasional. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam asas manfaat ini. Pertama, Indonesia harus selalu mewaspadaai situasi keamanan di Laut China Selatan yang sering dijadikan sengketa oleh beberapa negara di kawasan.

Secara ekonomi, konflik juga akan sangat berpengaruh mengingat, secara geografis selain letaknya sangat dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wilayah itu juga merupakan salah satu jalur lintas ekonomi internasional di mana ekspor impor Indonesia melewati jalur tersebut. Kedua, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional merasa perlu dan segera menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah Laut China Selatan, karena, dengan cara inilah Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri maupun di kawasan.



Beranjak dari asas manfaat di atas, maka, langkah selanjutnya yang harus dikedepankan dan sudah saatnya perlu dilakukan adalah pendalaman mengenai apa yang menjadi sumber konflik Laut China Selatan. Karena, pada kenyataannya, tidak ada penyebab konflik yang tunggal, sehingga, perlu dilakukan pencarian terhadap penyebab konflik yang dominan. Jika mau dirunut atau dipetakan (*conflict mapping*), sejatinya, sumber konflik di Laut China Selatan sangat beragam, bermula dari nilai ekonomi kemudian berkembang menjadi tuntutan sejarah antara China, Taiwan dan Vietnam dalam sengketa kepulauan Spratly, disusul dengan tuntutan modern; misalnya kedaulatan yang menjadi dasar klaim semua pihak (Sudira, 2014; 9).

Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Selain dorongan kepentingan nasional dalam rangka sistem pertahanan negara, upaya serius Indonesia tersebut juga didorong oleh motivasi moral sebagai pemimpin alami (*natural leader*) ASEAN --- mengingat, Indonesia juga mempunyai catatan yang baik dalam penyelesaian berbagai kasus di kawasan. Selain itu, usaha ini dapat dikatakan merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan ketika negara-negara yang bersengketa, terutama Tiongkok, hanya mau menggunakan pendekatan bilateral.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan teori kepentingan nasional (Kiyono, 1969; 2), serta konsep strategi militer (Clausewitz, 1942; 17).



## HASIL dan PEMBAHASAN

### Posisi Strategis Indonesia Di Konflik laut China Selatan

Potensi sangat besar yang ada di Laut China Selatan membuat negara-negara di sekitar mengklaim kepemilikannya. Dalam konteks ini, ada enam negara yang terdiri dari empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam, dan dua negara di luar ASEAN adalah China dan Taiwan. Keenam negara ini menyatakan sebagai pemilik sah kawasan itu dengan beragam alasan. Malaysia mengklaim karena faktor kedekatan (*proximity*), sementara Filipina mengklaim karena faktor penemuan dan pendudukan (*discovery and occupation*) serta kedekatan wilayah, sedang Vietnam merasa memiliki kawasan itu berdasarkan pada fakta sejarah, dan Brunei karena didasarkan pada landas kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Untuk menyelesaikan persoalan Laut China Selatan, sebetulnya, pihak-pihak terkait sudah membuat kesepakatan dalam kerangka *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* yang memiliki tiga tujuan, yakni *to promote confidence-building measures, to foster cooperation in maritime affairs and to prepare a formal and binding code of conduct* pada 2002 di Kamboja.


Berpijak pada tujuan ketiga sebagaimana tersebut di atas adalah menyusun COC yang formal dan mengikat. Berangkat dari COC diharapkan dapat menjadi sebuah dokumen yang bisa memberikan skema implementasi, monitoring dan sanksi. Proses pembuatan dokumen COC bisa dikatakan mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah terkait dengan penyusunan draft COC yang dikerjakan di lingkup negara-negara ASEAN tanpa melibatkan China. Sehingga membuat China merasa tidak nyaman. Dalam konteks penyusunan COC yang jelas akan sangat mungkin terjadi negosiasi yang alot antar phak-pihak yang bertikai dan akan memakan waktu yang tidak singkat.

Indonesia menyampaikan posisinya di konflik Laut China Selatan (LCS) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Amerika Serikat (AS) dan ASEAN yang berlangsung akhir Februari 2016 jika konflik LCS menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Indonesia berharap dan terus mendorong implementasi *Declaration of Conduct (DoC)* yang sudah ada antara ASEAN dan China, suatu deklarasi untuk meningkatkan kepercayaan ASEAN-China. Selain *Code of Conduct (CoC)* antara ASEAN dan China dapat segera selesai, Indonesia juga akan mendorong negara yang bersengketa agar meningkatkan dialog untuk menyelesaikan masalah perbatasan

### Pelaksanaan Politik luar Negeri Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan politik luar negeri RI memiliki dua aspek utama, yaitu untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia





internasional. Apa lagi, dalam kurun waktu 2010-2014, perkembangan dinamika global ditandai dengan pelbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional serta sangat kompleks. Selain itu, baik di tingkat global maupun regional, muncul pula isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Pada kurun waktu tersebut, politik luar negeri RI yang bebas-aktif masih dijalankan dengan pendekatan *all-directions foreign policy*. Sementara, pada tataran praktis, hubungan dan kerja sama yang baik antar semua negara diimplementasikan dengan semangat *a million friends, zero enemy*. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia untuk menjadi jembatan (*bridge builder*) atas berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional, sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada tataran dunia internasional, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkannya sehingga dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada forum internasional. Modal ini merupakan hasil kerja keras dalam menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dengan secara maksimal bagi kepentingan nasional.

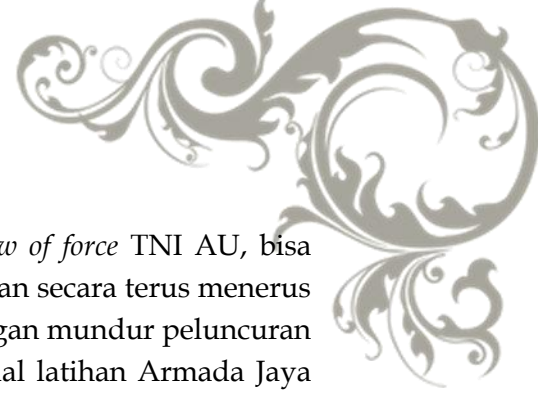
Selain itu, peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi *part of the solution* bagi penyelesaian masalah global seperti peranan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan. Mulanya, Indonesia tidak ikut serta apalagi mengklaim Laut China Selatan, namun, sejak kebijakan RRC membuat peta baru; Laut China Selatan merupakan ZEE yang termasuk dalam bagian dari wilayah maritim Indonesia, maka, Indonesia pun merasa berkepentingan.

### **Arah Kebijakan Penguatan Strategi Indonesia**

Perkembangan situasi kawasan regional yang dinamis mengharuskan Indonesia memperbaharui konsep dan strategi pertahanan NKRI. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Esensinya, persenjataan pengawal republik harus terus ditingkatkan. Alutsista TNI adalah keniscayaan yang wajib disegarkan. Perintah penting pun datang langsung dari panglima tertinggi TNI Presiden Jokowi seminggu sebelum unjuk kekuatan TNI AU di Belitong pada 28-29 September 2016. Sesuai rencana sebelumnya, Belitong akan “dihancurkan” oleh sedikitnya 48 jet tempur berbagai jenis yang dimiliki TNI AU lewat serangan udara selama dua hari. Namun seminggu sebelum hari H, Jokowi memerintahkan lokasi latihan dipindah ke Natuna.

Dinamika kawasan Natuna menunjukkan bahwa kita perlu menampilkan apa yang dimiliki sebagai sebuah keharusan yang diwajibkan walau secara





mendadak. Kenyataan ini dapat dikatakan sebagai *show of force* TNI AU, bisa juga untuk membalas unjuk kekuatan yang dipertontonkan secara terus menerus oleh negara tetangga. Atau mengobati rasa kecewa hitungan mundur peluncuran rudal China yang tak sesuai perintah Jokowi dalam serial latihan Armada Jaya sebelumnya.

Bahasa militer adalah lanjutan dari laporan intelijen. Bahasa militer yang seperti ini dapat saja sebagai bentuk kemarahan karena disepelekan --- atau karena ada yang mengatur lewat jalur diplomasi agar suasana di Natuna diupayakan tidak banyak terjadi gerakan militer. Hal ini sempat dilontarkan oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Paparan di atas menunjukkan, betapa pemindahan lokasi latihan TNI-AU yang dilakukan dengan secara mendadak adalah bagian dari metode simulasi yang tak direncanakan. Dengan kata lain, sangat mendekati kondisi sebenarnya jika suatu hari nanti Natuna memang harus diselamatkan dari ancaman agresi militer. Boleh jadi, manfaat dari pergeseran lokasi latihan ini adalah menguji kemampuan dan kecerdasan pemikir strategis TNI-AU untuk bertindak cepat dan tepat dalam segala suasana yang tidak ada dalam plot rencana.

Kenyataan tersebut di atas, bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, memindahkan alutsista, koordinasi antar satuan, gerakan pasukan ke tapal batas dengan hanya menggunakan satu pangkalan TNI-AU. Pada puncak latihan ini, Pekanbaru, Batam, Jakarta, dan Pontianak adalah pangkalan TNI-AU yang memegang peranan teramat penting. Betapa tidak, Bandara Hang Nadim menjadi pangkalan 7 jet tempur Sukhoi yang bermarkas di Makassar dan 10 F16 yang bermarkas di Pekanbaru. Sementara, Bandara Supadio Pontianak menjadi rumah sementara bagi 8 jet latihan tempur T50 Golden Eagle dan 6 Super Tucano -- - sedang beberapa pesawat angkut Hercules, CN295 diberangkatkan ke Batam, Supadio dan Natuna.

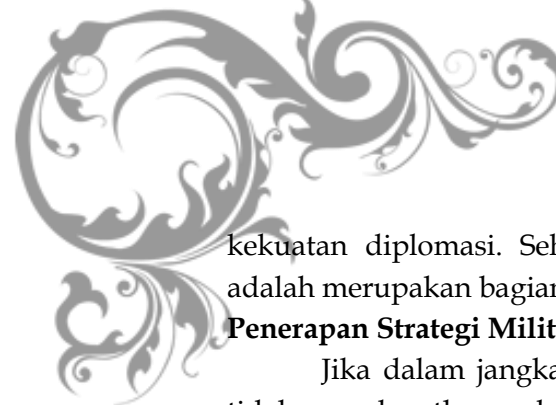
Tepat pada 03 Oktober sampai dengan 6 Oktober 2016, langit Natuna dipenuhi puluhan jet tempur dengan berbagai manuvernya. Sepanjang sejarah, untuk pertama kalinya TNI-AU melakukan latihan besar-besaran di Kepulauan Natuna.

Pada saat itu, hampir separuh kekuatan TNI AU dikerahkan dalam sebuah latihan operasi militer yang tidak direncanakan sebelumnya. Pesan terpenting dalam latihan ini adalah, pengerahan pasukan dalam menghadapi satu titik panas teritori sangat membutuhkan kuantitas dan kualitas alutsista yang benar-benar canggih. Bayangkan, jika terjadi dua titik panas dalam sebuah insiden teritori. Sudah barang tentu, distribusi alutsista tadi harus disebar.

Secara tegas penulis menyampaikan, tantangan berteritori kita bukan cerita fiksi, akan tetapi, kenyataannya ada musuh di depan mata. Oleh sebab itu, mempersiapkan militer yang kuat adalah bagian dari cara menjaga perdamaian dan persahabatan. Dengan kata lain, militer yang kuat akan menjadi pelapis







kekuatan diplomasi. Sehingga, menguji kekuatan TNI-AU langit di Natuna adalah merupakan bagian dari pesan diplomatik melalui bahasa militer.

### **Penerapan Strategi Militer dan Pertahanan**

Jika dalam jangka pendek maupun panjang konflik Laut China Selatan tidak mendapatkan solusi yang tepat, maka, ketahanan nasional pun bakal terganggu. Hal tersebut selaras dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Terkait dengan hal tersebut, sejak 2008 Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, adapun yang terakhir adalah Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka, strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*), pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan gangguan keamanan masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Selanjutnya, Kebijakan Umum Pertahanan Negara maupun Strategi Pertahanan Negara diterjemahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Sudah barang tentu, hal tersebut sesuai dengan Postur Pertahanan 2010-2029 yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan pada periode 2010-2024 yang diarahkan untuk memenuhi *minimum essential force* (MEF).

Selain meningkatkan kapabilitas alutsista, TNI juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur. Berikut adalah data kekuatan TNI di Kepulauan Natuna:

1. Membangun Pangkalan Sukhoi Su-27,
2. Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apache,
3. Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan,
4. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru,
5. Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL.

Pemerintah Indonesia meyakini akan potensi ancaman besar bagi kedaulatannya, khususnya sekitar kawasan Kepulauan Natuna, terkait memanasnya konflik Laut China Selatan. Oleh sebab itu, penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Sejatinya, dalam perselisihan di Laut China Selatan, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang paling “netral” dalam arti netral berdasarkan kepentingannya. Kenyataan ini tampak dengan jelas, Indonesia tidak mau secara terang-terangan mendukung Amerika dalam membendung pengaruh China, bahkan, Indonesia juga tidak melakukan penolakan berarti terhadap





“pendekatan” yang dilakukan China dalam mengimbangi kekuatan Amerika di ASEAN.

Jika kita mau merunut ke belakang barang sejenak, sejak 2004, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memodernisasi kekuatan militer yang sudah sangat memprihatinkan. Betapa tidak, selain kebanyakan alutsista yang dimiliki TNI sudah tua, keadaan ini juga makin diperparah dengan adanya embargo dari Amerika Serikat dan sekutunya sepanjang 1999-2005. Akibatnya, saat ini, di kawasan Asia Tenggara, kapabilitas Militer Indonesia menduduki urutan keempat, setelah Vietnam, Singapura dan Thailand.

Walau begitu, peringkat kepemilikan alutsista tidak otomatis menentukan perbandingan kekuatan militer. Sebuah lembaga analisis data mengenai kekuatan militer dunia, *Global Fire Power* menyusun peringkat kekuatan militer tidak hanya pada kapabilitas militer. Akan tetapi juga berdasarkan pada lebih lima puluh faktor yang berbeda; seperti potensi keputusan perang konvensional masing-masing negara berdasarkan kemampuan darat, laut dan udara, kemudian jumlah personel, sumber daya alam, keuangan, geografi, jumlah populasi, jumlah konsumsi minyak dan lain-lain. Berdasarkan Nilai Indeks Kekuatan Militer tersebut, pada 2015, ternyata, Indonesia mampu menempati peringkat ke 1 sampai 11 di antara Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Inggris, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Turki, Israel.

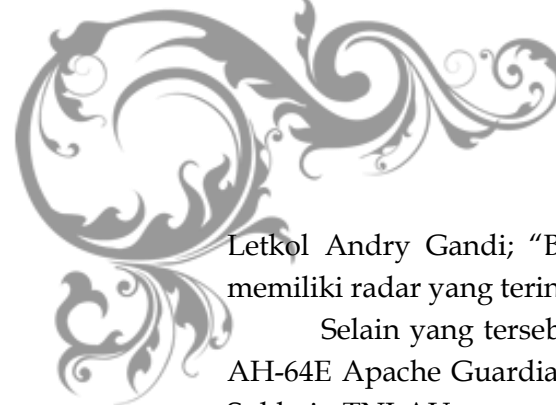
Berkait dengan yang tersebut di atas, selain meningkatkan kapabilitas alutsista, TNI juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur.

Strategi laut dengan menambah puluhan kapal dari Armabar TNI-AL di luar alutsista udara dan kekuatan darat, sesungguhnya, keberadaan TNI di sekitar Natuna juga ditentukan oleh patroli kapal. Sejak akhir 2014, TNI-AL telah menenggelamkan dan menangkap 78 kapal asing --- Pangarmabar, Laksamana Muda Widodo menyatakan; “TNI-AL memiliki 48 kapal yang bisa digunakan untuk bertempur atau mengamankan wilayah”.

Salah satu kekuatan tempur laut di Armada Barat adalah KRI Slamet Riyadi 352, jenis fregat yang juga bisa berfungsi sebagai kapal perusak. Kapal patroli lain yang berusia muda adalah KRI Kobra dan KRI Anakonda. Hanya saja, masih perlu ada pasokan BBM tambahan, karena yang tersedia saat ini baru mencukupi 27 persen kebutuhan operasional.

Selanjutnya strategi udara dengan membangun Pangkalan Sukhoi Su-27. Sejak 2014, TNI-AU sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Pangkalan khusus Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2.5 kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai






Letkol Andry Gandi; “Bandara ini sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi,”

Selain yang tersebut di atas, TNI-AU juga menyiapsiagakan 4 Helikopter AH-64E Apache Guardian. Selain menyiapkan pangkalan untuk seri jet tempur Sukhoi, TNI-AU pun menyiapkan kekuatan udara lainnya bila ada konflik melibatkan militer di Laut China Selatan. Tidak cukup sampai di situ, pada 2014, TNI-AD secara resmi juga menyiagakan empat unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat khusus untuk melindungi Natuna.

Untuk melakukan patroli udara, sementara masih menunggu penempatan Sukhoi, maka, dilakukan oleh Skwadron 16 Pekanbaru, Riau. Di pangkalan tersebut terdapat jet F-16 yang setara Block 52 dan dijadwalkan untuk melakukan patroli di sekitar wilayah Natuna dan Anambas. Saat ini, ada lima unit F-16 yang siaga di Pekanbaru. Sejatinya, penguatan kekuatan udara yang riil di Riau ini sudah dijalankan sejak 2013, mengingat, F-16 yang ditempatkan di Pekanbaru adalah merupakan kerja sama pengadaan dengan Amerika Serikat serta sudah dilakukan upgrade persenjataan tempurnya.



Sementara, strategi darat dilakukan dengan menambah 1 batalion infantri dari Bukit Barisan. *The Diplomat* mencatat, personil TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD, mengakui menambah satu batalion infanteri untuk mengamankan Kepulauan Natuna. Victor Robert Lee, dari *The Diplomat*, mengatakan; “Penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan lawatannya”.

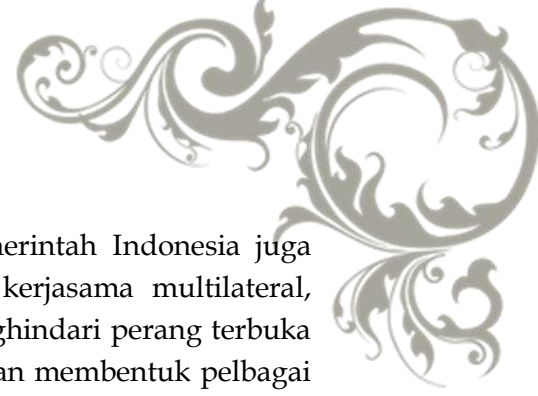
Selain di Ranai, kehadiran pasukan TNI juga disebar di pulau-pulau di sekitar Pulau Bunguran. “Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran ini,” kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Lodewjik F. Paulus.

Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna merupakan bukti betapa pemerintah Indonesia sangat meyakini adanya potensi ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia terkait dengan memanasnya konflik Laut China Selatan. Oleh sebab itu, penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga. Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri “bebas aktif”, maka, Indonesia memahami kerumitan dari konflik Laut China Selatan. Adapun, upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui jalur diplomasi, yakni diplomasi preventif. S.L. Roy menjelaskan; diplomasi preventif cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi menjadi perang senjata.

## SIMPULAN

Dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan, Indonesia menerapkan beberapa strategi yaitu: dalam aspek negara, di sini Indonesia melakukan strategi diplomasi terhadap negara-negara yang mengklaim Laut China Selatan agar





konflik tidak menjadi berkepanjangan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bertindak sebagai motor dan penggagas terbukanya kerjasama multilateral, mengintervensi, sekaligus menjadi jembatan untuk menghindari perang terbuka di antara negara-negara yang terlibat di dalamnya dengan membentuk pelbagai forum yang diadakan baik di ASEAN dengan harapan agar konflik tersebut segera mereda.

Namun, untuk menangkal berbagai hal yang tidak diinginkan, maka, Indonesia pun memperkuat kekuatan matra Darat, Laut dan Udara di Kepulauan Natuna yang terletak berseberangan dengan Laut China Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Clausewitz, Carl von Principle of War Copyright September 1942, The Military Service Publishing Company

E-Journal by Akmal Universitas Riau FISIP Hubungan Internasional. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut China Selatan Pada Tahun 2009-2014.

ketahanan Nasional. Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Konflik laut China Selatan. Lembaga Pertahanan Nasional RI. XIX(3). Hal. 118-129

Kiyono ken A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: as The Standard of American Foreign Policy NAOSITE: Nagasaki University's academic Output SITE 1969

Kurnia Erwin N.M. "Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas

Nur Sandy Ikfal Raharjo "Indonesia's Role In The South China Sea Dispute Resolution 2014

Nyoman I Sudira, "*Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*",

Rencana Strategis 2015-2019." Kementrian Luar negeri

Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. LIPI

Web Site <https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea>



#### TENTANG PENULIS

**Hendra Maujana Saragih**, merupakan dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional. Pria kelahiran Pekanbaru ini menempuh Strata S1 di Hubungan Internasional Universitas Nasional, Magister S2 ditempuh di Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan doktoral program studi Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Bandung. Aktif menulis di jurnal dan pembicara dalam seminar nasional dan internasional.